

EDISI 2013

JURNAL DEMOKRASI



B5 ✓

PANCASILA, DEMOKRASI dan KONFLIK SOSIAL

Pancasila dan Tantangan Ideologi Global
Oleh Firdaus Syam

Pancasila Antara Idealitas dan Realitas
Oleh Achmad Fachrudin

Paradigma Islam Indonesia
Oleh Imam Addaruqutni

Pemilukada DKI Jakarta 2012
Oleh Sumarno

Evaluasi Pemilukada DKI Jakarta 2012
Oleh Ramdansyah

Blusukan Jokowi Mengubah Jakarta
Oleh Zaenuddin HM

Pola Pengelolaan Konflik Partai Politik
Oleh Lusi Andriyani

Manajemen Konflik Masyarakat Perkotaan
Oleh Ma'mun Ibnu Ridwan

Tawuran (Konflik) di Johar Baru
Oleh Musni Umar dan Erman Anom

Sorot: Sengkarut Daftar Pemilih Tetap
Oleh Achmad Fachrudin dan Sakhroji

ISSN 2502-4028



POLA PENGELOLAAN KONFLIK PADA PARTAI POLITIK DALAM MENDUKUNG PENCIPTAAN KEHIDUPAN DEMOKRASI TANPA KEKERASAN

Era reformasi membawa pengaruh pada munculnya variasi partai politik serta telah membawa perubahan wacana ideologis kearah kepentingan-kepentingan praktis.

Variasi partai politik menjadikan pendorong bagi partai untuk menilik kembali pentingnya pola pengelolaan konflik yang ada di partai politik. Pada kajian ini melihat PAN, PKB, PKS dan PDI-P sebagai obyek yang diteliti. Partai tersebut dipandang dapat mewakili variasi partai politik dengan ideologi tertentu. Dalam penggalian data dilakukan melalui wawancara dan penggalian data sekunder. Dari data yang diperoleh didapatkan hasil bahwa pada umumnya konflik yang terjadi di partai politik bersumber dari konflik internal partai yang berkaitan dengan nomor urut pencalonana anggota legislatif, jabatan struktur di partai politik, jumlah suara yang diperoleh parpol serta konflik personal yang ada di pengurus parpol.



LUSI ANDRIYANI

Lahir di Lamongan 01 Pebruari 1978, menyelesaikan S1 di FISIP jurusan Ilmu Politik Universitas Airlangga tahun 2000 dengan gelar akademik SIP dan S2 di Magister Ilmu-Ilmu Sosial dengan peminatan ilmu politik di Universitas Airlangga Surabaya tahun 2008 dengan gelar akademik, M.Si. Penulis pernah membantu di jurusan ilmu politik FISIP UNAIR sebelum memulai karir sebagai dosen sejak tahun 2001 sebagai dosen Luar Biasa di Universitas Muhammadiyah Malang pada jurusan ilmu pemerintahan di FISIP. Tahun 2005 menjadi Dosen di FISIP Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Selama di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo penulis menjabat sebagai staff LPPM, Kepala Sie pengabdian masyarakat dan kepala sie kemahasiswaan. Tahun 2011 sampai sekarang mengabdikan diri sebagai dosen di program studi Ilmu Politik FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta.

ABSTRAK

Era reformasi membawa pengaruh pada munculnya variasi partai politik serta telah membawa perubahan wacana ideologis kearah kepentingan-kepentingan praktis. Variasi partai politik menjadikan pendorong bagi partai untuk menilik kembali pentingnya pola pengelolaan konflik yang ada di partai politik. Pada kajian ini melihat PAN,PKB,PKS dan PDI-P sebagai obyek yang diteliti. Partai tersebut dipandang dapat mewakili variasi partai politik dengan ideologi tertentu. Dalam penggalan data dilakukan melalui wawancara dan penggalan data sekunder. Dari data yang diperoleh didapatkan hasil bahwa pada umumnya konflik yang terjadi di partai politik bersumber dari konflik internal partai yang berkaitan dengan nomor urut pencalonana anggota legislative, jabatan struktur di partai politik, jumlah suara yang diperoleh parpol serta konflik personal yang ada di pengurus parpol. Di PAN konflik yang terjadi bersumber dari konflik internal berkaitan dengan nomor urut dan jumlah suara yang diperoleh. Di PKB konflik bersumber dari internal partai berkaitan dengan pemilihan pengurus partai, nomor urut dan jumlah suara, di PDI-P konflik lebih banyak bersumber dari internal partai yang berkaitan dengan nomor urut dan jabatan struktur partai. Di PKS konflik bersumber dari internal partai yang berkaitan dengan masalah personal pengurus atau kader partai. Pengelolaan konflik yang ada di Partai Amanat Nasional dilaksanakan melalui pola konsolidasi,

musyawarah mufakat. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di kelola oleh Dewan syuro, dewan pengurus partai, dewan tanfidz (pengurus harian), badan kehormatan untuk melakukan arbitrase. PDI-P konflik di krlola oleh alat kelengkapan partai. Strategi yang digunakan PKS untuk mengelola konflik lebih pada pola musyawarah, serta upaya untuk memberikan peringatan yang dilakukan oleh dewan syuro.

A. PENDAHULUAN

Era reformasi memberikan perubahan wacana pada politik Indonesia. Berkembangnya wacana mengenai demokrasi, penegakan hukum dan pemerintahan yang bersih telah membawa perubahan wacana ideologis kearah kepentingan-kepentingan praktis. Pembuktian riil dapat dilihat pada pemilihan umum pertama kali setelah runtuhnya rezim Soeharto dilaksanakan tahun 1999. Banyaknya variasi partai politik yang muncul dengan mengusung Islam sebagai asas partai sampai pada partai nasionalis yang mengusung simbol-simbol keagamaan¹. Dari 48 (Empat Puluh Delapan) partai yang ikut dalam pemilihan umum diawal reformasi, ada beberapa partai yang menggunakan identitas atas nama agama antara lain: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasi-

1. Dalam tataran kenyataan di Indonesia berdiri berbagai macam partai politik dengan latar belakang Islam. Latar belakang ini dimaksudkan sebagai "warna" dominan yang ada didalam sebuah partai politik. Dapat terjadi warna tersebut adalah merupakan asas dari partai atau simbol-simbol yang digunakan atau sejarah berdirinya partai yang dikaitkan dengan sebuah ormas Islam tertentu. (Islam dan Politik, Jafarsuhud.blogspot.com), diakses tanggal 20 Nopember 2007.

onal (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan (PK) yang berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nahdlatul Ummah (PNU) dan Partai Damai Sejahtera (PDS), dan identitas nasionalis seperti PDIP, PDI, PNI, Partai Marhaenis, maupun identitas sosialis seperti partai buruh. Fenomena tersebut telah membangkitkan semangat masyarakat Indonesia dengan basis keagamaan, nasionalis dan pluralis untuk mendirikan partai politik. hal tersebut dapat di lihat pada tabel sederhana berikut ini:

Tabel 1
Pertumbuhan Jumlah Partai Politik dari tahun 2006-20013

Tahun	Jumlah Partai Politik
2006	27 Partai baru
2007	43 Partai baru
2009	36 partai nasional, 6 partai lokal di Aceh
2013	12 partai nasional, 3 partai lokal di Aceh

Sumber: kolaborasi data kompas, jawapos.

Semangat untuk mendirikan partai politik baru merupakan karakteristik dasar dari sebuah negara demokrasi. Disamping itu upaya untuk mendirikan partai politik juga tidak bisa dilepaskan dari karakteristik masyarakat Indonesia yang majemuk². Realitas masyarakat yang majemuk memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi kemunculan partai-partai baru di Indonesia dan mendorong terbangunnya sistem multi partai. Banyaknya variasi partai politik dengan basis ideologi tertentu telah memberikan stimulus pada upaya untuk menilik kembali tentang pentingnya

pengelolaan konflik. Semakin banyaknya variasi partai politik memungkinkan terjadinya perbedaan implementasi nilai-nilai eksklusif partai pada tataran riil yang berbasis pada nilai-nilai ideologi partai politik yang di jabarkan dalam visi dan misi partai. Pandangan pentingnya pengelolaan konflik akan semakin menguat pada saat menjelang pemilihan umum dilaksanakan. Dimana setiap partai politik berupaya untuk melakukan penegasan kembali identitas partainya dan berupaya untuk mengimplementasikan keidentitasannya melalui program-program partai politik. Tidak hanya peran ideologi partai yang menjadikan isu penting dalam mengidentifikasi pentingnya pengelolaan konflik, namun partai politik sendiri sebagai organisasi dengan pola struktur yang berbeda juga menjadi isu penting untuk membahas pola pengelolaan konflik di partai politik.

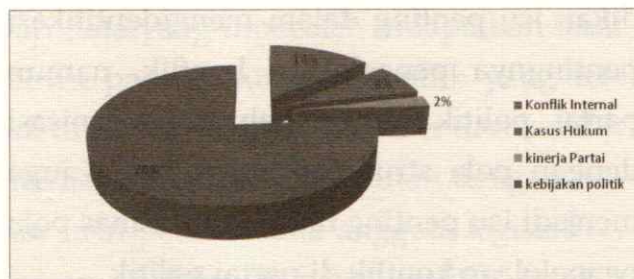
Konflik yang terjadi di partai politik saat ini lebih menggambarkan kondisi organisasi di tubuh partai politik tersebut. Konflik yang sering muncul di media massa menggambarkan bagaimana cara partai politik mengkondisikan permasalahan internal. Seperti yang terjadi di PKB pada tahun 2012 dimana konflik internal partai politik di picu oleh perebutan kursi tertinggi. Menurut ketua DPP PKB Marwan Ja'far, konflik yang terjadi di PKB tersebut berawal dari kekalahan untuk merebut jabatan tertinggi di partai politik dalam muk-tamar, kongres atau apapun istilahnya.³

2. Kacung Marijan, Sistem Politik Indonesia, Kencana, 2010, hal. 61

3. Republika, Rabu, 8 Pebruari 2012

Hal yang senada juga disampaikan oleh Laurent Bahang fungsionaris PAN bahwa ideologi sekarang sudah banyak irisannya, sehingga tidak terlalu jelas perbedaannya sehingga konflik terjadi biasanya bersumber pada organisasi seperti dalam permusyawaratan, kongres, pemilihan ketua umum dan pengurus, penempatan jabatan dan lainnya⁴. Dominannya konflik internal tersebut dapat dilihat pada bagan dibawah ini :

Gambar 1
 Faktor Pendorong Popularitas Partai Politik



Sumber : Pol Tracking periode Pebruari-Maret 2013

Kemunculan partai-partai baru juga tidak bisa dilepaskan dari pola kelembagaan dalam proses penyelesaian konflik internal di dalam partai politik. hal tersebut dapat dilihat dari peran elit politik lama yang membidani munculnya partai politik baru. Hal ini terjadi karena mereka kecewa atau tersingkir dalam arena politik khususnya dalam perebutan kepemimpinan partai, sehingga mereka berusaha untuk membentuk partai-partai baru. Hal tersebut dapat di contohkan dengan kasus di PDIP pada awal tahun 2004, dimana kekecewaan elit

lama telah memunculkan partai baru dengan nama PDI-P, begitu juga dengan PPP para politisi yang kecewa akhirnya membentuk partai baru yaitu Partai Bintang Reformasi (PBR). Dalam kondisi seperti ini dapat di katakan bawa munculnya partai baru merupakan solusi konflik internal partai sehingga partai baru yang muncul ibarat "old wine in new bottle"⁵

Dari pemaparan diatas, bahasan yang berkaitan dengan pengelolaan konflik yang ada di partai politik ini menjadi penting disebabkan oleh beberapa hal antara lain: Banyaknya partai baru yang muncul diawal Reformasi telah membangun sebuah wacana baru mengenai menguatnya identitas dan lahirnya variasi partai politik yang dapat dimaknai sebagai keberagaman pemikiran masyarakat. Kebebasan yang ditawarkan pada era reformasi juga semakin memperkuat adanya sentiment keagamaan dan budaya. Aksi-aksi atas nama agama, nasionalis, pluralis serta ideologi lainnya untuk kepentingan golongan tertentu telah mempertegas bahwa selain munculnya variasi partai politik, era reformasi juga memberikan peluang tumbuh suburnya kelompok-kelompok keagamaan, nasionalis dan pluralis. Untuk itu dalam penelitian ini ingin mengetahui bagaimana pola penyelesaian konflik pada partai politik khususnya di PAN, PDI-P, PKS dan PKB, sehingga nantinya diharapkan akan dapat mendukung tercipta kehidupan demokrasi tanpa kekerasan.

4. Republika, Jum'at 15 Pebruari 2013

5. Kacung Marijan, Sistem Politik Indonesia, Kencana, 2010, hal. 66

B. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bahasan ini menggunakan teori yang berkaitan dengan konflik dan proses politik sebagai alat analisis yang dominan, selain pandangan tentang partai politik.

Partai Politik

Pandangan tentang partai politik menjadi penting karena objek kajian yang diambil di dalam penelitian ini adalah partai politik. secara konseptual banyak pandangan yang mengemukakan tentang definisi partai politik itu sendiri. Menurut Leon D. Epstein yang dikutip oleh Deden Faturrahman menjelaskan bahwa partai politik dapat diartikan sebagai sebuah organisasi yang terbangun dari kelompok-kelompok yang bertujuan untuk mendapatkan jabatan publik dalam pemerintahan, dengan identitas-identitas tertentu⁶. Dengan demikian yang dimaksud dengan partai politik bukanlah sebagai organisasi yang mempunyai hubungan yang terbatas, namun merupakan organisasi yang mempunyai kegiatan yang berkesinambungan, yang berakar dalam masyarakat lokal dan melakukan kegiatan terus menerus, berusaha memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan serta ikut serta dalam pemilihan umum⁷.

Dengan cara yang berbeda Austin Ranney yang dikutip oleh Deden Faturrahman dalam bukunya ilmu politik mem-

buat batasan konseptual dengan melihat karakteristik-karakteristik fundamental antara lain; Partai politik adalah kelompok-kelompok masyarakat yang beridentitas, terdiri dari beberapa orang yang terorganisasi yang dengan sengaja bertindak bersama sama untuk mencapai tujuan partai, memiliki legitimasi berupa hak-hak untuk mengorganisasikan dan mengembangkan diri mereka, mempunyai tujuan untuk mengembangkan aktivitas-aktivitas, partai bekerja melalui mekanisme pemerintahan yang mencerminkan pilihan rakyat, mempunyai aktivitas untuk menyeleksi kandidat untuk jabatan publik⁸

Sedangkan dari asal-usul partai politik dapat dijelaskan melalui teori kelembagaan, situasi historic dan teori pembangunan :⁹

- a. Teori kelembagaan, partai politik dibentuk oleh kalangan legislative (dan eksekutif) karena ada kebutuhan para anggota parlemen (yang ditentukan berdasarkan pengangkatan) untuk mengadakan kontak dengan masyarakat dan membina dukungan dari masyarakat.
- b. Teori situasi historis, terjadi manakala satu system politik mengalami masa transisi karena perubahan masyarakat dari bentuk tradisional yang berstruktur sederhana menjadi masyarakat modern yang berstruktur kompleks.
- c. Teori pembangunan, partai politik

6. Deden Fathurrohman, Pengantar Ilmu Politik, UMM Press, 2002, hal.270

7. Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Gramedia, 1992, hal 114

8. Opcit, faturrahman, hal.271

9. Opcit, surbakti, hal.113

muncul karena modernisasi social ekonomi yang dapat mempengaruhi manusia untuk melahirkan akan kebutuhan terhadap organisasi politik yang dapat memadukan dan memperjuangkan berbagai aspirasi.

Partai politik sendiri mempunyai fungsi yang penting untuk membangun kesadaran masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Adapun fungsi partai politik antara lain¹⁰:

- a. *Representation*; Representasi merupakan fungsi mendasar dari partai politik, hal tersebut menggambarkan kemampuan partai politik dalam merespon dan mengartikulasikan apa yang diinginkan anggota partai politik dan pemilih (*voters*).
- b. *Elite formulation and recruitment*; partai politik mempunyai bagian dan tanggungjawab terhadap negara melalui pola kepemimpinan politiknya (*political leader*).
- c. *Goal formulation*.; partai politik berfungsi memformulasikan tujuan atau sebagai pemandu kepentingan dari berbagai ragam masyarakat.
- d. *Interest articulation and aggregation*; partai politik juga mempunyai fungsi untuk mengartikulasikan kepentingan yang berbeda, menampung dan memadukan berbagai macam kepentingan yang berbeda untuk dirumuskan menjadi alternative kebijakan.

e. *Socialitation and mobilization*; partai politik merupakan agen dari pendidikan dan sosialisasi politik. Partai politik juga mempunyai pilihan terhadap focus apa yang akan dijadikan sebagai agenda politik, serta nilai dan perilaku yang akan dijadikan sebagai bagian dari budaya politik jangka panjang.

f. *Organization of government*; di dalam masyarakat modern, tidak ada pemerintahan tanpa partai politik. partai politik membantu pemerintah melalui formasi pemerintahan. Partai politik memfasilitasi kerjasama antara dua kekuatan besar yang ada dalam pemerintah yaitu legislative dan eksekutif.

Dalam pandangan lain, partai politik mempunyai fungsi yang berbeda dengan pandangan Heywood diatas, menurut Ramlan Surbakti dalam bukunya memahami ilmu politik terdapat tujuh fungsi partai politik antara lain:

- a. Sosialisasi politik: partai politik mempunyai peran dalam membentuk sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Yang dilakukan seumur hidup melalui proses pendidikan, baik secara formal maupun non formal.
- b. Rekrutmen politik: partai politik mempunyai peran untuk melaksanakan rekrutmen politik melalui pola seleksi dan pemilihan serta pengangkatan seseorang atau seke-

10. Andrew Heywood, *Politics*, Macmillan Press, 1998, hal.233

lompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam system politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.

- c. Partisipasi politik: partai politik mempunyai fungsi untuk membuka kesempatan, mendorong dan mengajak para anggota dan masyarakat untuk menggunakan partai politik sebagai saluran kegiatan untuk mempengaruhi proses politik.
- d. Pemandu kepentingan: partai politik mempunyai fungsi untuk menampung, menganalisis dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda untuk menjadi berbagai alternative kebijakan umum, kemudian diperjuangkan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.
- e. Komunikasi politik : partai politik berfungsi sebagai komunikator politik yang tidak hanya menyampaikan segala keputusan dan penjelasan kepada masyarakat, tetapi juga menyampaikan aspirasi dan kepentingan berbagai kelompok masyarakat.
- f. Pengendalian konflik: partai politik mempunyai fungsi untuk mengendalikan konflik melalui cara dialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik.
- g. Kontrol politik: peran partai politik dalam menunjukkan kesalahan,

kelemahan dan penyimpangan dalam isi suatu kebijakan atau dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah.

Dalam kenyataannya, tidak semua fungsi tersebut dilaksanakan dalam porsi dan keberhasilan sama. Hal tersebut tidak hanya bergantung pada sistem politik namun dari model terbangunnya partai politik serta kelembagaan partai politik itu sendiri.

Secara tipologi, partai politik dapat dibedakan berdasarkan atas asas dan orientasi, komposisi dan fungsi anggota, basis social dan tujuan dari partai politik. penjelasan tentang tipologi partai politik dapat dilihat pada tabel berikut ini ¹¹:

Kemunculan partai-partai baru tidak bisa dilepaskan dari pola kelembagaan dalam proses penyelesaian konflik internal di dalam partai politik. hal tersebut dapat dilihat dari peran elit politik lama yang membidani munculnya partai politik baru. Hal ini terjadi karena mereka kecewa atau tersingkir dalam arena politik khususnya dalam perebutan kepemimpinan partai, sehingga mereka berusaha untuk membentuk partai-partai baru.

11. Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Gramedia, 1992, hal 122-123

TABEL 2 TIPOLOGI PARTAI POLITIK

No	Tipologi Partai Politik	Penjelasan
1	Asas dan Orientasi	Terbagi dalam tiga kategori : <ul style="list-style-type: none"> • Partai pragmatis: partai politik yang mempunyai program dan kegiatan yang tidak terikat kaku pada suatu doktrin ideology tertentu • Partai doktriner: partai yang memiliki program dan kegiatan konkret sebagai penjabaran ideology. • Partai kepentingan: partai politik yang dibentuk dan dikelola atas dasar kepentingan tertentu
2	Komposisi dan Fungsi Anggota	Terbagi dalam dua kategori : <ul style="list-style-type: none"> • Partai massa: partai yang mengandalkan kekuatan pada keunggulan jumlah anggota dengan cara memobilisasi massa sebanyak banyaknya. • Partai kader: partai yang mengandalkan kualitas anggota, ketaatan organisasi dan disiplin anggota sebagai kekuatan.
3	Basis Sosial dan Tujuan	Terbagi dalam empat tipe : <ul style="list-style-type: none"> • Partai politik yang beranggotakan lapisan-lapisan social dalam masyarakat. • Partai politik yang beranggotakan kelompok kepentingan tertentu • Partai politik yang beranggotakan dari pemeluk agama tertentu • Partai politik yang beranggotakan kelompok budaya tertentu

Sumber: Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, 1999.

Konflik

Pembahasan tentang konflik berkaitan dengan bagaimana cara pandang terhadap masyarakat. Apabila di pandang dari pendekatan struktural konflik, maka masyarakat merupakan bagian yang memiliki kepentingan yang saling bertentangan. alam kehidupan masyarakat tersebut terdapat upaya untuk memperebutkan hal yang sama, walaupun pada akhirnya consensus menjadi solusi untuk menyelesaikan konflik. untuk itu konflik dan konsensus menjadi suatu hal yang tidak terelakkan dalam masyarakat. Istilah konflik sendiri lebih mengarah pada tindakan kekerasan, kerusuhan dan tindakan lainnya yang cenderung berkonotasi anarkis.

Konflik sendiri dibedakan atas dua hal; yaitu konflik yang berwujud kekerasan dan konflik yang tidak berwujud kekerasan. Dalam masyarakat yang belum mempunyai landasan dasar serta mekanisme dalam menyelesaikan konflik, maka konflik akan

cenderung bersifat kekerasan. Sedangkan masyarakat yang sudah mempunyai landasan dasar menyelesaikan konflik serta mempunyai lembaga yang mengelola konflik, maka konflik akan lebih bersifat positif dengan pola yang terorganisir melalui tindakan yang tidak anarkis.

Konflik yang terjadi dalam masyarakat juga dipengaruhi oleh tujuan yang diinginkan. Pada dasarnya konflik terjadi karena dalam masyarakat berupaya untuk mendapatkan sumber-sumber kekuasaan serta mempertahankan sumber-sumber kekuasaan tersebut. Upaya mendapatkan dan mempertahankan sumber tersebut memunculkan variasi konflik yang bersifat analitis, karena dalam kenyataannya dalam masyarakat kedua-duanya merupakan bentuk tujuan yang dapat memunculkan konflik dalam masyarakat.

Penyebab konflik antara lain adalah :

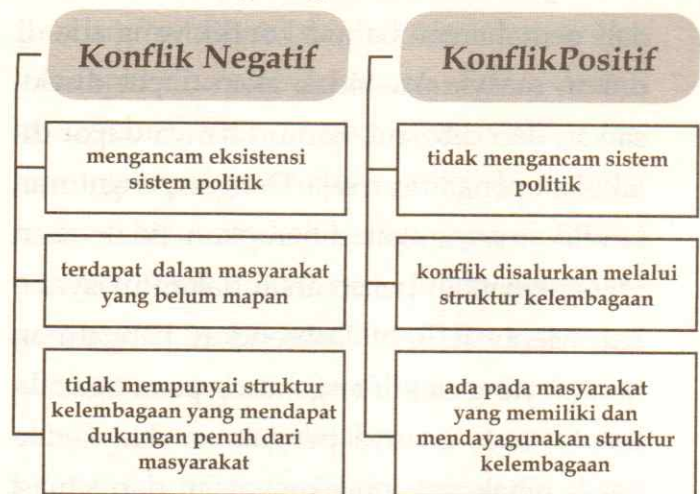
- Kemajemukan horisontal: struktur masyarakat yang majemuk secara kultural, seperti suku, bangsa, daerah, agama dan ras.
- Kemajemukan vertikal; majemuk secara sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi seperti petani, buruh, pedagang, pengusaha, pegawai negeri sipil, militer, wartawan, dokter, alim ulama dan cendekiawan dan dalam arti perbedaan karakteristik tempat tinggal, desa dan kota.

Tipe-tipe konflik

Tipe konflik menurut Paul Conn terbagi menjadi dua kategori atau tipe yaitu, konflik yang bersifat positif dan konflik yang bersifat negatif. Konflik negatif dalam hal ini adalah konflik yang berkaitan dengan upaya untuk mengancam eksistensi system politik yang di wujudkan dalam tindakan non konstitusional. konflik negative terjadi pada masyarakat yang belum mapan karena belum mempunyai lembaga pengelola konflik. Sedangkan konflik yang bersifat positif lebih mengarah pada upaya yang tidak mengancam eksistensi sistem politik dan dapat diselesaikan melalui peran lembaga-lembaga penyelesaian konflik seperti partai politik.

Tipe konflik menurut Paul Conn terbagi menjadi dua kategori atau tipe yaitu, konflik yang bersifat positif dan konflik yang bersifat negatif

Bagan 1
Tipologi Konflik



Sumber: kolaborasi dari buku memahami Ilmu Politik, Ramlan Surbakti.

Struktur Konflik

Situasi terjadinya konflik dalam masyarakat memungkinkan terjadinya pola saling menguntungkan dan tidak. Dua hal tersebut menjadikan dasar pembagian struktur konflik. menurut Paul Conn konflik di bedakan menjadi dua hal: 1) konflik menang kalah (*zero-sum cobflikc*), dan 2) konflik menang-menang (*non zero sum conflict*).

Bagan 2
Struktur Konflik



Sumber : kolaborasi dari buku memahami Ilmu Politik, Ramlan Surbakti.

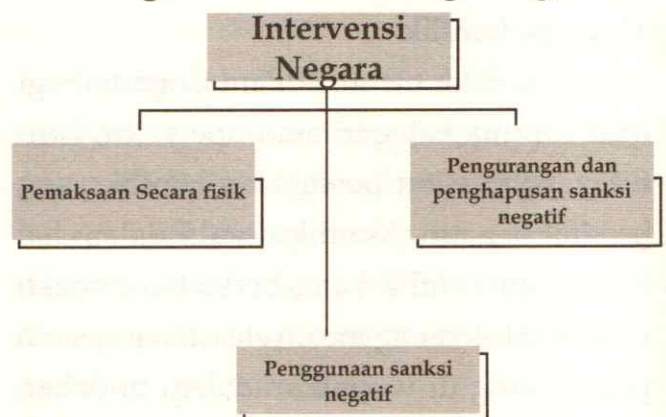
Pengaturan Konflik

Pengaturan konflik merupakan respon dari pemahaman bahwa konflik yang ada di dalam masyarakat tidak akan dapat diselesaikan dan dibasmi, namun hanya dapat dilakukan pengaturan saja. Dengan pengaturan konflik masyarakat diharapkan tidak akan mengakibatkan perpecahan dalam masyarakat. Menurut Rahl Dahrendorf pengaturan konflik yang efektif tergantung pada tiga faktor. *Pertama*, adanya pengakuan dari kedua belah pihak terhadap kenyataan dan situasi konflik yang terjadi. *Kedua*, kepentingan yang diperjuangkan harus terorganisasi secara rapi sehingga dapat dipahami dengan jelas. *Ketiga*, adanya kesepakatan terhadap aturan main yang dijalankan oleh kedua belah pihak. Dengan ketersediaan ketiga unsur tersebut akan mendukung keefektifan pengaturan konflik yang ada dalam masyarakat dalam berbagai cara.

Ada tiga pola pengaturan konflik yang di gagas oleh Dahrendorf, antara lain adalah: dalam bentuk konsiliasi, mediasi, dan arbitra-

si. Adapun dari pemikiran Ziegenhagen, pengaturan konflik dapat dilakukan melalui tindakan intervensi yang dijalankan oleh negara dengan melakukan paksaan secara fisik dan ancaman penggunaannya ataupun sanksi atas salah kedua belah pihak atau salah satu pihak yang berkonflik, atau bahkan melakukan penghapusan terhadap sanksi negative tersebut. Pola penyelesaian konflik seperti ini juga harus didukung dengan pemilikan kapasitas untuk memaksa dari negara.

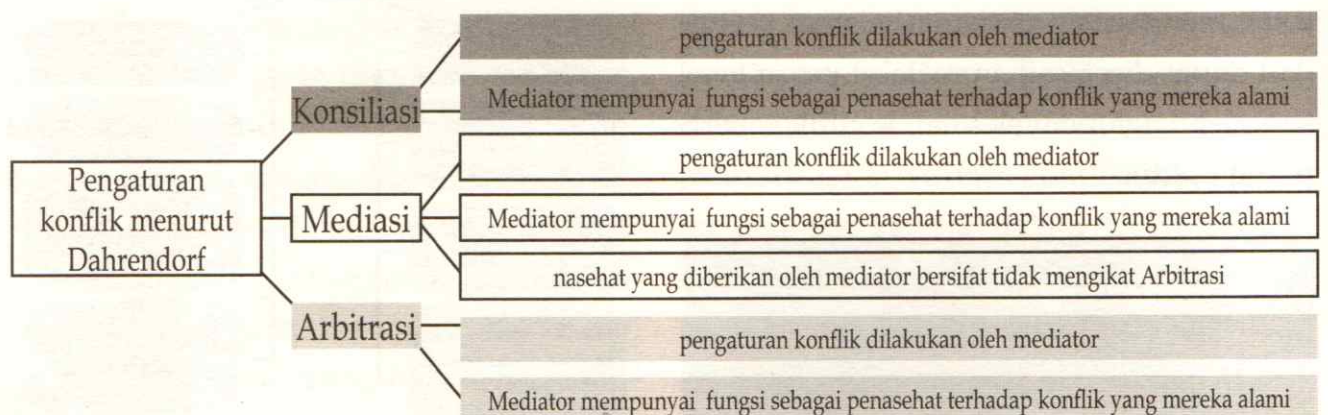
Bagan 3
Pengaturan Konflik Ziegenhagen



Sumber: Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik 199

Bagan 4

Pola Pengaturan Konflik Dahrendorf



Sumber: Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, 1999

Penyelesaian Konflik (*Conflict Resolution*)

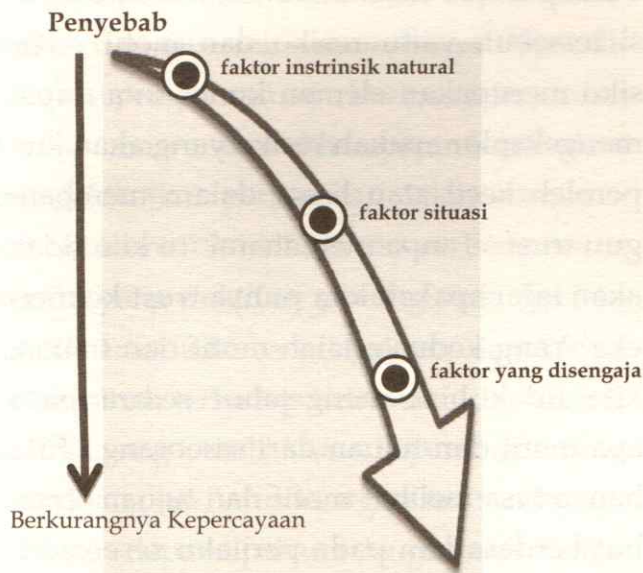
Penyelesaian konflik merupakan upaya untuk mengetahui sebab-sebab konflik daripada manifestasi politik. Dalam pembahasan yang berkaitan dengan manajemen konflik yang ada di partai politik, pola yang tepat adalah dengan menggunakan *the dynamics and trust models*, pola ini dipilih untuk memetakan isu dan penyebab konflik yang ada di partai politik. Partai politik merupakan organisasi yang dibangun dengan meletakkan "kepercayaan" sebagai modal utama untuk bergerak bersama mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam pola ini mencoba memaparkan bagaimana trust itu di bangun, bagaimana *trust* itu berkurang dan bagaimana *trust* mempunyai peran dalam proses resolusi konflik.

Model ini telah dikembangkan oleh Daryl Landau seorang pendiri lembaga mediator dan trainer dalam bidang resolusi konflik. pola ini dikembangkan untuk memahami dinamika 'trust' dalam interaksi manusia. Salah satu isu penting dalam resolusi model ini adalah isu "trust" yang ada di partai politik. *trust* merupakan batasan yang penting dalam menemukan penyebab munculnya isu konflik. meskipun isu tersebut tidak dapat diperoleh di partai itu sendiri. Dilain hal *trust* merupakan sumberdaya yang unik, kita dapat berkembang karena *trust*, kita juga bisa tidak berkembang juga karena *trust*. *Trust* adalah sumberdaya kunci dalam proses manajemen konflik. *Trust* harus dipahami sebagai sebuah komoditas dalam hubungan manusia.

Secara sederhana *trust* dapat didefinisikan sebagai motif dan ekspektasi dengan intensitasnya, dan mempunyai resiko. Terdapat dua elemen utama dalam definisi tersebut, yaitu resiko dan motif. Resiko merupakan elemen kunci, kita dapat mengeksplor apakah resiko yang akan kita peroleh kecil atau besar dalam membangun *trust*. Tanpa memahami itu kita tidak akan tahu apakah kita punya *trust* ke mereka. Yang kedua adalah motif dan tujuan, kita tidak bisa mengetahui secara pasti apa motif dan tujuan dari seseorang. Kita hanya bisa melihat motif dan tujuan tersebut berdasarkan pada perilaku seseorang. Dari beberapa gambaran diatas, model ini menfokuskan pada dua hal: a) menilai tingkatan kebutuhan dan toleransi partai terhadap resiko, b) menilai penyebab dan kesalahan.

Toleransi terhadap resiko merupakan hal kompleks yang terkait dengan pengalaman masa lalu dengan persepsi terhadap hal yang sama. Namun toleransi terhadap resiko tidak didasarkan pada personality dan persepsi namun lebih pada hubungan antara rasa takut terhadap kemungkinan resiko dengan membandingkan antara keuntungan yang diperoleh. Dengan kata lain bahaya atau tidak tergantung dari keuntungan yang diperoleh. Sedangkan berkaitan dengan penyebab dan kesalahan terkait dengan sebab yang mendorong kita untuk melakukan kesalahan yang biasanya dikarenakan keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini terkait dengan kepribadian dan lingkungan.

Gambar 2
Pola Hubungan Antara Penyebab
Konflik dan Trust



Sumber: Gary T Furlong, *The conflict Resolution Tool Box*, John Wiley and Sons Canada Ltd, 2005, Hal. 136.

Dalam gambar diatas digambarkan bahwa, apabila penyebab adalah situasi yang terjadi diluar kontrol manusia karena tertekan, informasi yang tidak akurat, maka kepercayaan tidak akan berkurang dan masih tinggi, adapun apabila penyebabnya berasal dari kondisi alamiah seperti budaya, tradisi ataupun nilai-nilai yang dikembangkan, maka kepercayaan nilainya akan berkurang namun masih bisa dibangun kembali. Sedangkan factor yang ke tiga yaitu apabila penyebabnya adalah faktor kesengajaan dari manusia maka kepercayaan yang ada akan berkurang dan bahkan hilang.

Hubungan antara faktor penyebab dan munculnya kesalahan:

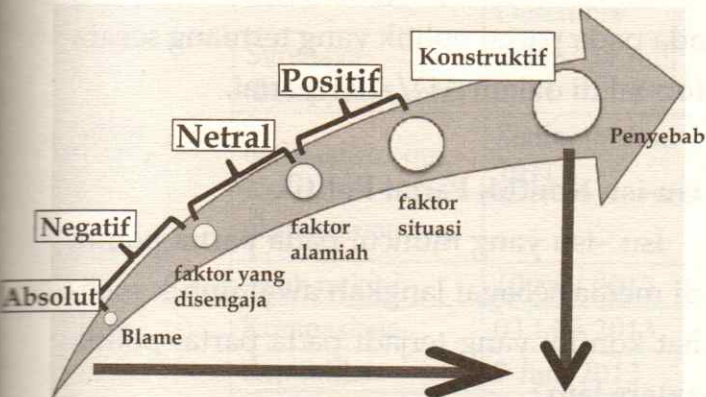
Terdapat korelasi yang kuat antara penyebab dan kesalahan yang di munculkan

yang terjadi di partai, ada tiga pola untuk menjelaskan hal tersebut :

1. Konstruktif: apabila penyebabnya adalah situasi, maka kepercayaan masih tinggi, kesalahan tidak berpengaruh pada kepercayaan yang ada.
2. Positif: apabila penyebabnya dalam rentang atau jarak antara situasi dan instrinsik alamiah, pada pola ini kesalahan dinilai rendah dan kepercayaan mempunyai nilai yang sedang, artinya kepercayaan yang ada berkurang namun masih ada.
3. Netral: apabila penyebabnya adalah factor instrinsik alamiah, dimana kesalahan yang muncul sedikit dan masih ada beberapa yang percaya.
4. Negatif: apabila penyebabnya ada pada area factor instrinsik alamiah dan factor kesengajaan. Pada kondisi ini kesalahan yang muncul mempunyai bobot sedang sehingga kepercayaan yang ada rendah.
5. Absolut: apabila kesalahan yang di munculkan sangat absolut sehingga tidak ada sama sekali kepercayaan.

Dalam pembahasan yang berkaitan dengan manajemen konflik yang ada di partai politik, pola yang tepat adalah dengan menggunakan *the dynamics and trust models*, pola ini dipilih untuk memetakan isu dan penyebab konflik yang ada di partai politik.

Pola Hubungan Tingkat Kesalahan dengan Tingkat Kepercayaan



Sumber: Gary T Furlong, *The conflict Resolution Tool Box*, John Wiley and Sons Canada Ltd, 2005, Hal. 136.

C. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN:

Dalam upaya membangun partai politik yang mampu menyelesaikan konflik partai politik baik internal maupun eksternal sebagai upaya mendukung kehidupan demokrasi tanpa kekerasan. Oleh karena itu dalam penelitian tahun kedua ini bertujuan untuk: a) mencari penyebab konflik internal dan eksternal, b) mengkolaborasi pemodelan politik identitas pada partai politik dalam mendukung penciptaan kehidupan demokratis tanpa kekerasan.

Manfaat penelitian ini adalah sebagai upaya mengembangkan studi dan kajian dalam bidang politik yang mengambil isu mengenai pola pengelolaan konflik pada partai politik yang akan membuka peluang gagasan-gagasan baru. Secara praktis diharapkan dapat menjadi acuan bagi partai politik dalam melaksanakan politik praktis yang dengan pola pengelolaan konflik yang lebih mapan.

D. PERSPEKTIF DAN PENDEKATAN PENELITIAN

Penelitian ini berupaya untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan konflik pada partai politik. Penelitian ini akan diarahkan kebentuk diskriptif atau cerita mendetail dari informan untuk dapat menggambarkan penyebab terjadinya konflik partai politik, baik internal maupun eksternal. Untuk itu tipe penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Teknik pengambilan data dilakukan melalui wawancara, serta data sekunder; diperoleh melalui pemberitaan surat kabar, majalah, Televisi, Internet, jurnal-jurnal ilmiah serta dokumen-dokumen yang terkait dengan konflik yang terjadi baik secara internal maupun eksternal pada partai politik.

Untuk menyusun pola pengelolaan konflik pada partai politik yang berbasis agama (PKS), nasionalis (PDIP) dan pluralis (PAN) dalam mendukung penciptaan kehidupan demokrasi tanpa kekerasan, maka peneliti melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan alasan untuk membangun dan membantu peserta sehingga memungkinkan adanya negosiasi makna dan dapat lebih cepat dalam memperoleh data awal mengenai sebuah fenomena.

Untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan konflik yang terjadi di partai politik dalam mendukung pelaksanaan politik identitas tanpa kekerasan yang dilaksanakan oleh partai politik dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dengan model deskriptif eksplanatif yang dimaksudkan agar dapat lebih efektif dan

intens untuk melihat interaksi yang menyebabkan konflik dan pola penyelesaian serta pengelolaan konflik yang ada dalam partai politik.

E. HASIL DAN PEMBAHASAN

Instrumen Pemetaan Konflik Pada Partai Politik

Untuk mencari pola pengelolaan konflik pada partai politik perlu dilakukan beberapa tahapan penting antara lain: a) mencoba

memetakan konflik yang terjadi pada partai politik dengan melihat isu-isu yang berkembang. b) melihat pengelolaan konflik yang ada pada partai politik yang tertuang secara formal di dalam AD/ART partai.

Isu-isu Konflik Partai Politik

Isu -isu yang muncul pada partai politik di media sebagai langkah awal untuk melihat konflik yang terjadi pada partai politik antara lain :

TABEL 3
ISU-ISU KONFLIK PARTAI POLITIK DI MEDIA

PARPOL	NAMA MEDIA	TANGGAL	ISU KONFLIK
PAN	Media Online Bhirawa (Harian Bhirawa)	Senin, 13 Desember 2010	Mantan Terpidana Korupsi Pimpin MPP PAN Sidoarjo periode 2010-2015 (Ir Amrullah, terjerat kasus korupsi di DPRD Sidoarjo)
	Sidoarjo-HARIAN BANGSA	Jumat, 07 Mei 2010	Konflik DPD PAN Meruncing
	Sidoarjo (beritajatim.com)	Jum'at, 20 Mei 2011	PAN dan PDIP Sidoarjo Belum Serahkan laporan pertanggung jawaban (LPJ) penggunaan dana bantuan politik (Banpol) tahun 2010
	REPUBLIKA.	Minggu, 20 Juni 2010	PAN Targetkan 10 Persen Suara pada Pemilu 2014, DPW PAN Jatim diharapkan mampu menyabet 11 kursi DPR-RI pada Pemilu 2014
	Pasuruan, zonaberita.com	Kamis, 30 Desember 2010	Kandidat Ketua DPD PAN Pasuruan Kecewa
	pasuruan.info	Rabu, 16 Juni 2010	PAN Pasuruan Dukung Sunartoyo
PKB	REPUBLIKA.	Kamis, 26 Agustus 2010	Pansus-PT MLJ Bahas Dana Talangan Korban Lumpur Lapindo
	REPUBLIKA	Selasa, 17 Mei 2011	Ketum PBNU Minta Konflik PKB-NU Dilupakan
	dpp-pkb.or.id	Kamis, 06 Januari 2011	Di Kota Pasuruan, Bapak Jabat Wali Kota, Anak Jadi Ketua DPRD
	INILAH.COM, Pasuruan	Senin, 21 Maret 2011	Lily Wahid Tantang PKB Sumpah Poncong
	INILAH.COM, Pasuruan	Senin, 21 Maret 2011	Lily Wahid Belum Tertarik Pindah Partai

PKS	klikompas.wordpress.com	October 1, 2010	FPKS Ingatkan Pemerintah Komitmen Menyelesaikan Kasus Lumpur Sidoarjo
	REPUBLIKA.	Minggu, 26 Desember	Anas: Tak Ada Friksi di Setgab Koalisi
	Surabaya (beritajatim.com)	Sabtu, 04 Juni 2011	PKS Surabaya Tidak Setuju Penutupan Dolly
	beritajatim.com	Senin, 06 Juni 2011	PKS dan PSK
	pkspasuruan.org		Rumah Aktivis PKS Pasuruan Dirusak
	Aceh terkini	10 Mei 2013	PKS ingin meminimalkan konflik krprntingan
	Kompasiana	03 Mei 2013	Kasus PKS oknum atau persoalan institusi
	Republika	7 Juni 2013	Kenaikan BBM, konflik PKS dan Demokrat
PDIP		31 Maret 2013	Konflik elit PKS sedikit mempengaruhi kader
	Sidoarjo (beritajatim.com)	Jum'at, 20 Mei 2011	PAN dan PDIP Sidoarjo Belum Serahkan laporan pertanggung jawaban (LPJ) penggunaan dana bantuan politik (Banpol) tahun 2010
	REPUBLIKA.	Jumat, 18 Maret 2011	PDIP Surabaya Ditetapkan Sebagai Cabang Pelopor
	Pasuruan (beritajatim.com)	Rabu, 06 Oktober 2010	Tipu Pakai Cek Kosong, Politisi PDIP Divonis 1,5 Tahun
	Riau24.com,	Minggu 07 April 2013	Cegah konflik di Dapil PDI-P atur dana kampanye
Republika	Rabu, 4 September 2013	Gerindra bantah memantik konflik dengan PDI-P soal Jokowi	

Tabel 4

Pemetaan Pola Pengelolaan Konflik Pada Partai Politik

TOPIK KASUS/ISU/ KONFLIK	PENYEBAB	PENYELESAIAN
Mantan Terpidana Korupsi Pimpin MPP PAN Sidoarjo periode 2010-2015 (Ir Amrullah, terjerat kasus korupsi di DPRD Sidoarjo)	Perbedaan antara aturan dengan etika serta faktor kedekatan. Ketua terpilih, Imam Sugiri, menyatakan, terpilihnya Amrullah merupakan kehendak forum Musda yang saat itu menyaring ada dua nama yakni Khulaim Junaedi (mantan ketua DPD PAN) dan Amrullah. Akhirnya dalam musyawarah Amrullah yang terpilih jadi ketua. Bagi kader PAN, Amrullah dianggap masih punya nilai kedekatan apalagi selama ini masih aktif di partai.	Musyawarah

<p>Pencalonan bupati dan wakil bupati Kabupaten Sidoarjo</p>	<p>Konflik internal di tubuh DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Sidoarjo yang menjadi dua kubu, Konflik juga berimbas pada pencalonan bupati dan wakil bupati. Dimana, PAN Sidoarjo mengusung dua kubu pasangan cabup-cawabup. Hasil rekom DPW PAN Jatim mengusung pasangan Imam Sugiri-Ahmad Fathoni Rodli (Maton). Sementara kubu lain yakni kubu Ketua DPD PAN Sidoarjo, Khulaim Junaidi dan Sekretaris Sungkono tengah mengusung pasangan Emy Susanti-Khulaim Juanidi (Mikul). Akibat adanya dua kubu tersebut, DPW PAN Jatim melengser dengan menonaktifkan Ketua DPD PAN Sidoarjo, Khulaim Junaidi dan Sekretarisnya Sungkono.w</p>	<p>Menon aktifkan ketua DPP PAN Sidoarjo</p>
<p>PAN dan PDIP Sidoarjo Belum Serahkan laporan pertanggung jawaban (LPJ) penggunaan dana bantuan politik (Banpol) tahun 2010</p>	<p>Ketua DPD PAN Sidoarjo Imam sugiri saat dikonfirmasi para wartawan mengaku partainya sudah menyerahkan LPJ Banpol itu sejak dua bulan lalu. Kalau Bakesbang Linmas sampai saat ini belum menerima, Imam Sugiri menyatakan akan mengeceknya kembali. "Sudah kami laporkan LPJ itu. Tapi tetap akan saya cek kembali, sudah sampai ke Bakesbang Linmas atau belum," tukasnya.</p>	<p>Melakukan Pengecekan ke Bakesbanglinmas</p>
<p>PAN Targetkan 10 Persen Suara pada Pemilu 2014, DPW PAN Jatim diharapkan mampu menyabet 11 kursi DPR-RI pada Pemilu 2014</p>	<p>Mengusung isu untuk program kerja partai yang difokuskan pada pemberantasan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.</p>	<p>Mengusung program kerja yang lebih fokus</p>
<p>Kandidat Ketua DPD PAN Pasuruan Kecewa</p>	<p>Pemilihan DPD PAN Pasuruan : Nur Kholis yang berasal dari non kader ini tak diundang saat Musyawarah Daerah (Musda) di Rumah makan Tengger Kecamatan Rejoso. Musda yang digelar pada 26 Desember 2010 mengagendakan pemilihan ketua DPD PAN periode 2010-2015.</p>	<p>Musyawarah Daerah</p>

PAN Pasuruan Dukung Sunartoyo	Wakil Ketua DPD PAN Kabupaten Pasuruan M Yunus Akim menilai sosok yang tepat memimpin DPW PAN Jatim mendatang adalah Sunartoyo dengan alasan Sunartoyo punya kedekatan emosional dan komitmen dalam menjaga amanah.	Dialog dengan kader PAN
Ketum PBNU Minta Konflik PKB-NU Dilupakan	Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj meminta konflik yang pernah terjadi antara NU dengan PKB untuk dilupakan, karena konflik itu tidak akan menguntungkan siapapun.	Melipakan konflik internal antara NU dan PKB
Di Kota Pasuruan, Bapak Jabat Wali Kota, Anak Jadi Ketua DPRD	Jabatan yang diemban bapak dan anak. Hal yang termasuk langka tersebut terjadi di Kota Pasuruan, Jawa Timur. Sejak 18 Oktober 2010, kota itu punya pemimpin baru. Yakni, Wali Kota Hasani dan wakilnya, Setiyono, yang berhasil memenangi pilkada pada Juli tahun lalu. Sedangkan kursi ketua DPRD yang ditinggalkan ternyata digantikan M. Ismail yang tak lain adalah anak kandungnya. Ketika Hasani aktif di PKB, jejaknya lantas diikuti sang anak. Saat Hasani menjadi ketua Dewan Tanfidziah PKB Kota Pasuruan, Ismail menjadi wakil sekretaris.	Membangun komitmen profesionalisme menjadi anggota Dewan
Lily Wahid Tantang PKB Sumpah Poncong	Lily Wahid menilai recall dan pemecatan terhadap dirinya, benar-benar telah menciderai demokrasi di Indonesia, yang selama ini sudah mulai terbangun. Pasalnya, hal tersebut dilakukan secara sewenang-wenang atas dasar suka dan tidak suka terhadap dirinya.	Diselesaikan melalui pengadilan negeri Jakarta pusat
FPKS Ingatkan Pemerintah Komitmen Menyelesaikan Kasus Lumpur Sidoarjo	Anggota Komisi V dari Fraksi PKS, Sigit Sosiantomo mengingatkan pemerintah untuk menjalankan komitmennya menyelesaikan kasus Lumpur di Sidoarjo dengan segera merevisi peta area terdampak. Menurut Sigit, pemerintah masih saja berpatokan pada kondisi lapangan 2-3 tahun yang lalu, padahal saat ini kondisi lapangan sudah jauh berbeda dibanding 2 atau 3 tahun sebelumnya. "Pemerintah seharusnya sudah menganggarkan di APBN tahun 2011 untuk ke-4 desa tersebut yang belum dimasukkan kedalam peta area terdampak" kata Sigit saat Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Penanganan Lumpur Sidoarjo (BPLS) di Ruang Rapat Komisi V DPRRI Jakarta, Selasa (28/9).	Menganggarkan desa yang terdampak ke APBN

<p>Anas: Tak Ada Friksi di Setgab Koalisi</p>	<p>Menurut Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, mengungkapkan bahwa tak ada masalah maupun friksi antarpolisi dalam sekretariat gabungan (setgab). Yang ada hanya dinamika politik terkait munculnya beberapa perbedaan pandangan dalam partai koalisi “Perbedaan itu wajar saja,” kata Anas di Surabaya, Sabtu (25/12). Menurutnya, kekecewaan yang dilontarkan jajaran pengurus PKS, PAN, dan PPP, yang menuding bahwa setgab hanya mengakomodasi kepentingan Partai Demokrat dan Golkar sangat tak mendasar. Anas menyebut bahwa setgab mengakomodasi setiap partai koalisi dan tak pernah meninggalkan setiap keinginan partai pendukung.</p>	<p>Membentuk setgab</p>
<p>Rumah Aktivis PKS Pasuruan Dirusak</p>	<p>Satu gerombolan pria menyerbu rumah milik Aliuddin, aktivis Partai Keadilan Sejahtera (PKS), di Dusun Banyak Putih, Desa Lecari, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. Aliuddin mengaku tidak mengetahui motif penyerangan rumahnya, “Saya tanya pada mereka apa salah saya. Saya juga sampaikan permintaan maaf jika saya memang punya salah pada mereka. Tapi, mereka malah marah-marah dan melempari rumah saya,” ujar Ali. Ali memastikan tak punya masalah dengan siapa pun. “Saya sungguh enggak mengerti latar masalahnya. Tapi, saya duga ada orang-orang yang enggak senang dengan kegiatan saya di PKS,” kata dia.</p>	<p>Melakukan permintaan maaf</p>
<p>PAN dan PDIP Sidoarjo Belum Serahkan laporan pertanggung jawaban (LPJ) penggunaan dana bantuan politik (Banpol) tahun 2010</p>	<p>Bendahara DPC PDIP Sidoarjo Mundzir Dwi Ilmiawan membenarkan jika partainya masih menyiapkan LPJ banpol tahun 2010. “Saat ini LPJ itu masih dalam penyelesaian. Kalau sudah rampung, akan segera kami laporkan ke Bakesbang Linmas,” tandasnya. Seharusnya “Seperti ketentuan yang ada, mestinya sebulan setelah menerima dana banpol itu, parpol yang bersangkutan bisa melaporkan LPJ Banpol yang dimaksud ke Bakesbang Linmas,” ujar Kepala Bakesbang Linmas Sidoarjo Drs Fauzi Isfandiari</p>	<p>Menyelesaikan laporan ke bakesbanglinmas</p>
<p>Pencalonan walikota dan wakil walikota Surabaya tahun 2011</p>	<p>Berawal dari keputusan pansus DPRD Surabaya yang melengserkan Rismaharani dari posisi walikota karena dianggap melanggar UU dan permendagri terkait kebijakan menaikkan harga reklame lewat perwali</p>	<p>Pemanggilan walikota dan wawali Surabaya serta DPD PDIP Jatim, DPC PSIP Surabaya dan fraksi PDIP DPRD Surabaya ke Jakarta</p>

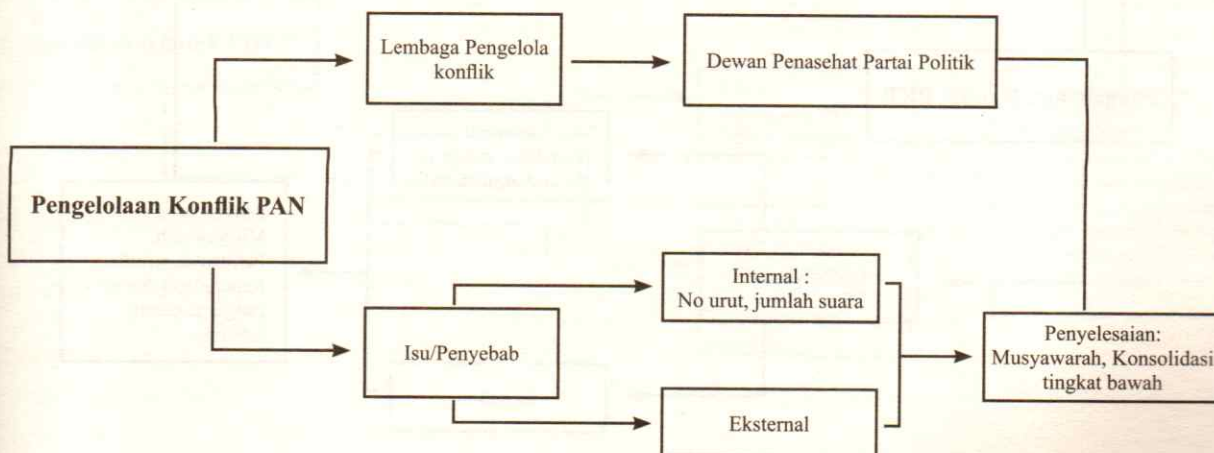
<p>Tipu Pakai Cek Kosong, Politisi PDIP Divonis 1,5 Tahun</p>	<p>Gara-gara terlibat penipuan cek kosong, Subriyanto (42), politisi kawakan PDI Perjuangan asal Desa Karangjati Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, Rabu (6/10/2010) divonis 1 tahun 6 bulan kurungan penjara dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Bangil.</p>	<p>Pengadilan</p>
<p>Kenaikan BBM, memunculkan konflik PKS dan Demokrat</p>	<p>Kebijakan untuk menaikkan kembali BBM pada tahun 2013 Pola koalisi yang segmented Partai politik pada saat pemilu telah banyak memberikan janji-janji sehingga ada perbedaan kepentingan</p>	<p>Koalisi</p>
<p>Gerindra bantah memantik konflik dengan PDI-P soal Jokowi</p>	<p>Pandangan encalonan Jokowi sebagai capres dan dukungan kontrak politik tertulis yang dilakukan oleh Prabowo dan Megawati</p>	<p>Kontrak politik</p>

Pengelolaan konflik PAN

Pengelolaan konflik yang ada di Partai Amanat Nasional dilaksanakan melalui pola konsolidasi, musyawarah mufakat. Partai Amanat Nasional melakukan konsolidasi dari tingkat bawah, apabila terjadi konflik internal. Konflik yang muncul pada PAN banyak terjadi karena perebutan posisi dalam pencalonan anggota legislative, serta pada pencalonan untuk menjadi kepala daerah.

Setiap konflik yang muncul di PAN sepanjang tidak berkaitan dengan peraturan partai maka akan diselesaikan secara musyawarah. Apabila berkaitan dengan kerusakan citra partai, dan melanggar aturan yang telah ditetapkan bersama, maka akan dilaksanakan konsolidasi secara berjenjang dari tingkat bawah. Hal ini dilakukan sebagai upaya pengelolaan konflik yang ada di tubuh PAN.

Bagan 5
Pola Pengelolaan Konflik di PAN



Pengelolaan konflik PKB

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) belum mempunyai lembaga khusus untuk menangani konflik di partai. Namun ada beberapa bagian atau alat partai yang berfungsi untuk menangani konflik yang muncul. Lembaga tersebut antara lain: Dewan syuro, dewan pengurus partai, dewan tanfidz (pengurus harian), badan kehormatan untuk melakukan arbitrase.

Konflik yang muncul pada PKB pada umumnya berasal dari internal partai. Di antaranya berkaitan dengan pemilihan pengurusan, penentuan no urut, dan jumlah suara yang diperoleh oleh PKB dalam pelaksanaan pemilu. Konflik yang muncul tersebut diselesaikan dengan cara musyawarah, pemberian surat peringatan selama tiga kali yang dilakukan oleh dewan pengurus partai, dilaksanakan rapat pleno dewan pengurus partai serta dilakukan arbitrase.

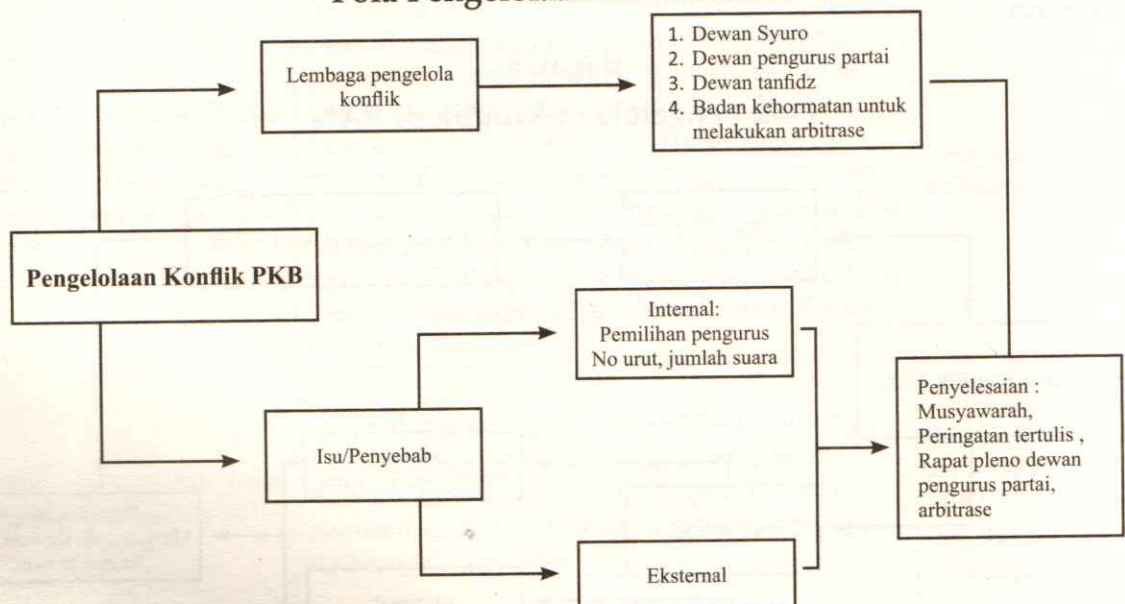
Pengelolaan Konflik PDI-P

Unsur-unsur pengelolaan konflik yang ada di PDIP telah tercantum dalam Anggaran Dasar PDI-P Bab IV tentang Organisasi yang terdapat pada Bagian kedua tentang alat kelengkapan partai yang berperan dalam pengelolaan konflik partai politik.

Alat kelengkapan partai politik tersebut antara lain :

- Dewan Pertimbangan Partai
- Badan pendidikan dan pelatihan partai
- Badan penelitian dan pengembangan partai
- Badan pemenangan pemilu
- Badan informasi dan komunikasi partai
- Badan bantuan hukum dan advokasi
- Badan penanggulangan bencana
- Badan verifikasi partai
- Komite disiplin partai
- Fraksi partai

Bagan 6
Pola Pengelolaan Konflik PKB



- Sekretaris Partai

Dari alat kelengkapan partai politik, yang mempunyai peran untuk mengelola konflik adalah :

1. Dewan pertimbangan partai yang bertugas untuk melakukan konsultasi dan koordinasi dengan komponen partai yang ada pada tingkatan pusat, daerah dan cabang.
2. Konggres partai juga mempunyai peran untuk menilai dan melakukan rehabilitasi anggota partai yang terkena pemecatan.
3. Komite disiplin partai yang di jelaskan di anggaran rumah tangga pada BAB I tentang keanggotaan , pasal 8 berakhirnya keanggotaan, serta pada BAB II pasal 8 tentang disiplin dan sanksi partai.
4. Bagi anggota yang melanggar disiplin

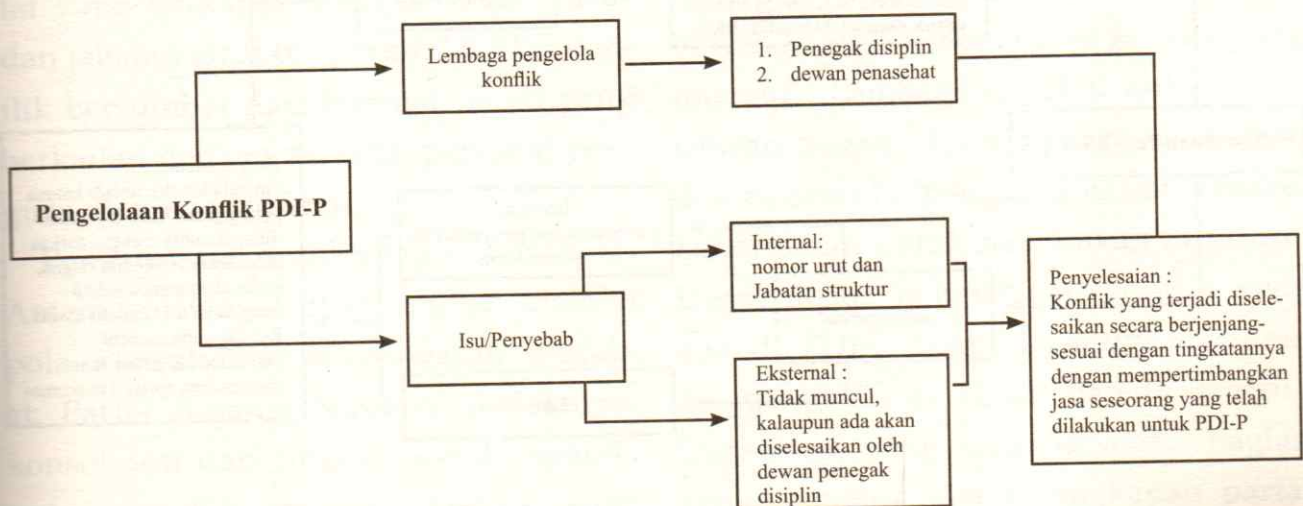
kepartaian maka akan di jatuhi sanksi setelah mendapat rekomendasi dari komite disiplin.

Dari alat kelengkapan partai yang disebutkan diatas, maka strategi yang digunakan oleh PDI-P didalam mengelola konflik yaitu melalui model:

- a. Konsultasi
- b. Rehabilitasi
- c. Sanksi atas rekomendai komite disiplin

Semua pola penyelesaian dilaksanakan secara berjenjang dari ranting, cabang, sampai pusat. Dalam menyelesaikan masalah lebih di titik tekankan pada pola konsultasi, apabila tidak bisa di peroleh solusi maka akan dilakukan pemberian sanksi sesuai dengan jenjang tingkatan masing-masing.

Bagan 7
Pola Pengelolaan Konflik PDI-P



Pengelolaan Konflik PKS

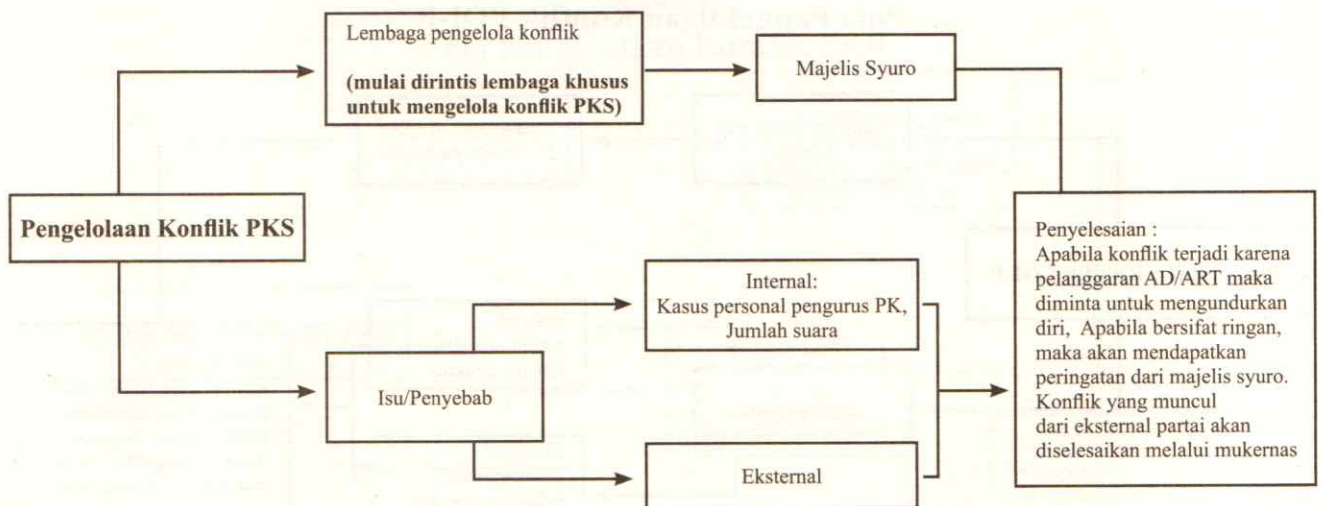
Dalam melaksanakan praktek politik PKS cenderung lebih rapi dan terstruktur. Di PKS konflik yang muncul lebih banyak berkaitan dengan personal, dan tidak berpengaruh pada struktur partai yang telah dibangun. Mengingat PKS merupakan partai kader yang sangat selektif dalam menentukan posisi seseorang di dalam jenjang struktur kepartaian.

Strategi yang digunakan untuk mengelola konflik lebih pada pola musyawarah, serta upaya untuk memberikan peringatan yang dilakukan oleh dewan syuro. Adapun putusan yang diberikan oleh dewan syuro bagi anggota partai politik yang melanggar bersifat tertutup dan hanya diketahui oleh anggota yang melanggar/ anggota yang terkena sanksi saja. Hal ini dilakukan berdasarkan pada landasan Islam, dimana aib anggota (saudara seiman) tidak boleh untuk disebar luaskan.

Adapun teknis penghentian konflik/isu yang muncul dan mengakibatkan pada buruknya citra partai lebih ditekankan pada personal yang terkena isu. Sehingga setiap anggota partai yang dipandang telah melakukan tindakan yang merugikan partai politik (PKS) atas kesadaran pribadi untuk mengundurkan diri. Tindakan mengundurkan diri tersebut bukan semata untuk kepentingan personal, namun untuk kepentingan partai. Upaya mengundurkan diri biasanya dilakukan sebelum ada peringatan dari majelis syuro.

Dari strategi yang digunakan oleh PKS diatas, maka pengelolaan konflik lebih di bebaskan sebagai tanggungjawab dari Dewan Syuro. Adapun saat ini PKS juga mulai merumuskan bagian khusus untuk mengelola konflik partai politik. Sehingga konflik yang muncul baik dari internal parti maupun eksternal partai mampu dikendalikan dengan baik.

Bagan 8
Pola Pengelolaan Konflik PKS



F. SIMPULAN

Pada umumnya konflik yang terjadi di partai politik bersumber dari konflik internal partai yang berkaitan dengan nomor urut pencalonan anggota legislatif, jabatan struktur di partai politik, jumlah suara yang diperoleh parpol serta konflik personal yang ada di pengurus parpol. Di PAN konflik yang terjadi bersumber dari konflik internal berkaitan dengan nomor urut dan jumlah suara yang diperoleh. Di PKB konflik bersumber dari internal partai berkaitan dengan pemilihan pengurus partai, nomor urut

na perebutan posisi dalam pencalonan anggota legislative, serta pada pencalonan untuk menjadi kepala daerah. Setiap konflik yang muncul sdi PAN sepanjang tidak berkaitan dengan peraturan partai maka akan diselesaikan secara musyawarah. Apabila berkaitan dengan perusakan citra partai, dan melanggar aturan yang telah ditetapkan bersama, maka akan dilaksanakan konsolidasi secara berjenjang dari tingkat bawah. Hal ini dilakukan sebagai upaya pengelolaan konflik yang ada di tubuh PAN.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) be-

Pada umumnya konflik yang terjadi di partai politik bersumber dari konflik internal partai yang berkaitan dengan nomor urut pencalonan anggota legislatif, jabatan struktur di partai politik, jumlah suara yang diperoleh parpol serta konflik personal yang ada di pengurus parpol.

dan jumlah suara, di PDI-P konflik lebih banyak bersumber dari internal partai yang berkaitan dengan nomor urut dan jabatan struktur partai. Di PKS konflik bersumber dari internal partai yang berkaitan dengan masalah personal pengurus atau kader partai.

Pengelolaan konflik yang ada di Partai Amanat Nasional dilaksanakan melalui pola konsolidasi, musyawarah mufakat. Partai Amanat Nasional melakukan konsolidasi dari tingkat bawah, apabila terjadi konflik internal. Konflik yang muncul pada PAN banyak terjadi kare-

lum mempunyai lembaga khusus untuk menangani konflik di partai. Namun ada beberapa bagian atau alat partai yang berfungsi untuk menangani konflik yang muncul. Lembaga tersebut antara lain: Dewan syuro, dewan pengurus partai, dewan tanfidz (pengurus harian), badan kehormatan untuk melakukan arbitrase. Unsur-unsur pengelolaan konflik yang ada di PDI-P telah tercantum didalam Anggaran Dasar PDI-P Bab IV tentang Organisasi yang terdapat pada Bagian kedua tentang alat kelengkapan partai yang berperan dalam pengelolaan kon-

flik pada partai politik. Dalam menyelesaikan masalah lebih di titik tekankan pada pola konsultasi, apabila tidak bisa di peroleh solusi maka akan dilakukan pemberian sanksi sesuai dengan jenjang tingkatan masing-masing. Strategi yang digunakan PKS untuk mengelola konflik lebih pada pola musyawarah, serta upaya untuk memberikan peringatan yang dilakukan oleh dewan syuro.

adilan dan diskriminasi. www.polarhome.com

- A. Almond, Gabriel, (1990), Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara, Penerjemah Sahat Simamora, Jakarta, Bumi Aksara
- Baso Ahmad, 2003, Plesetan Lokalitas, Politik Pribumisasi Islam, Jakarta : Desantra Pustaka Utama

Setiap konflik yang muncul di PAN sepanjang tidak berkaitan dengan peraturan partai maka akan diselesaikan secara musyawarah. Apabila berkaitan dengan perusakan citra partai, dan melanggar aturan yang telah ditetapkan bersama, maka akan dilaksanakan konsolidasi secara berjenjang dari tingkat bawah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jawi, Shiddiq, (19 Desember 2006): Internet: Membentuk partai Politik Islam Sejati, diakses tanggal 19 Maret 2008, <http://ayok.wordpress.com/2006/12/19/partai-politik-islam/>
- Arbain, (12:01:2007): Internet: Penyakit politisasi Agama, diakses pada tanggal 19 Maret 2008. www.wahidinstitute.org/indonesia/content/view/332/52.
- Azra, Azyumardi, Dr, (1996) Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post modernisme, Jakarta, Paramadina.
- Awwas, S. Irfan : Internet: Mencari akar radikalisme merespon ketidak
- Bubandt, Nils dan Molnar, Andrea, (2004); jurnal; Dipinggir Konflik: Kekerasan, Politik dan Kehidupan Sehari-hari di Indonesia Bagian Timur, Jurnal Antropologi Indonesia 74, 2004
- Ciptadi, MS, Dr. Prof: (07:01:2008): Internet: Islam dan kemajemukan di Indonesia, diakses tanggal 18 Maret 2008,
- Chalid, Idham, (20:02:2008): Internet: Penguatan Integrasi Sosial, diakses pada tanggal 27 Maret 2008, <http://gp-anshor.org/?p=4206-41k>.
- D. Smith, William, (2007), *Multiculturalism, Identity, and The Articulation of Citizenship : The Indian Question Now, Latin American*

- Research Review*; 2007: 42, 1:
Academic Research Library pg.238
- Doug Lorimer,: (Internet):
(Anggota Executive Commite
Democratic Socialist Party
Australia), *Globalisasi, neo
liberalisme dan dorongan-dorongan
kemunduran ekonomi kapitalis*, Jurnal
kiri, Situs indo-Marxist
 - Esposito, John L., (1999),
*Dialektika Peradaban: Modernisme
Politik dan Budaya diakhir Abad
20*, Yogyakarta, Qalam.
 - Esposito, John L, (1986), *Identitas
Islam Pada Perubahan Sosial
Politik*, Jakarta, Bulan Bintang.
 - E. Apter, David, (1988), *Pengantar
Analisa Politik*, Rajawali, Jakarta.
 - FredW Riggs,(10:11:1998):
Internet:*Concepts of Globalization*,
[http://www2.hawaii.edu/~fredr/
glanotes.htm](http://www2.hawaii.edu/~fredr/glanotes.htm)
 - Faturrahman, Deden, (2002),
Pengantar Ilmu Politik, Universitas
Muhammadiyah Malang press
 - Gary T Furlong (2005), *The conflict
Resolution Tool Box*, John Wiley and
Sons Canada Ltd.
 - Hasan Kosebalaban, (2005) :
Internet: *The Impact of Globalization
on Islamic Political Identity The Case
of Turkey*, *World Fairs, Academic
Library*.
 - Hassan, Haniff Muhammad,(2007):
Internet: *War, Peace or Neutrality:
On Overview of Islamic Polity's
Basis of Inter-State Relations*, 28 Juni
2007; No 130; *S.Bajaratnam School of
International Studies*, Singapore
 - Heywood, Andrew,(1997), *Politics*,
Bath, Great Britain.
 - Kuntowijoyo,(1997),
Identitas Politik Umat Islam,
Bandung, Mizan
 - Kacung Marijan,(2010), *Sistem
Politik Indonesia: konsolidasi
Demokrasi Pasca Orde Baru*,
kencana
 - Lee, Ruthann,(2005), *The anti
globalization movement, queer
diasporas, and cultural production*,
*womwn & environments international
magazine, fall 2004/winter
2005;64/65; Academic Research
Libarary, pg.29*
 - Mirriam, (1997), *Dasar-Dasar Ilmu
Politik*, PT. Gramedia, Jakarta.
 - Meyer, Thomas, (2004), *Politics of
Identity: The Challenge of Modern
Fundamentalism*, Federich Elbert
Stiftung
 - Meyers, Jurgens,(1998) *Menentang
Negara Sekuler: Kebangkitan
Nasionalisme Religius*, Bandung
Mizan.
 - Miswari, Zuhairi: Internet:
*Kehidupan Beragam; Multiekspresi
keberagaman*, diakses tanggal 21
Nopember 2007, [http//kompas.
com](http://kompas.com).
 - Madan Sarup, *Identity, Culture and
Post modern World*, Eidenburgh
University Press
 - Muslim Nasution, Ikhwan,

- (2008):Internet: Masih adalah (Partai Politik) Islam di Legislatif ? diakses pada tanggal 19 Maret 2008
- Mukhtar, Haji Ridwan, (15 Desember 2006): Internet: Politik Identitas, diakses tanggal 5 Februari 2008, www.acehinstitute.org
- Nusantara, Gigh (2002): Internet: Globalisasi, Fundamentalisme dan Tuntutan Demokratisasi, diakses tanggal 22 Mei 2007
- Rahardjo, Dawan, (2007): Internet: Agama diranah public, diakses Nopember 2007
- Surbakti, Ramlan (1992), Memahami Ilmu Politik, Jakarta, PT. Gramedia
- Syaf'i Muftid, Ahmad, (2004), Penggunaan simbol-simbol keagamaan untuk kepentingan politik, Jurnal Multikultural dan Multireligius Vol. VIII, Oktober-Desember 2004, Harmoni
- Tierney, Nathan, Comparative Ethics: Religion, the globalization of war, and Restorative Justice, California Lutheran University
- LAIN-LAIN**
- Tempo, Edisi 15-21 Oktober 2007
- Internet: Partai Politik Akui Kinerjanya Rendah, diakses tanggal 18 Maret 2008, http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=314476&katid=161CM
- Internet: Konstruksi Partai Islam Ideologis, <http://www.hizbut-tahrir.or.id/al-waie/index.php/2008/02/05/konstruksi-parpol-islam-ideologi>
- Internet: Menteri Agama Kritik Globalisasi Barat. Internet: dalam www.fajar.co.id, Mc. Luhan, "Membungkai Paradigma Islam Humanis Dalam Kampong Global? Refleksi Terhadap Kekerasan Atas Nama Agama?". <http://lafadlinspace.org/infolafadl/buku/globalisme.html>
- Internet: Perolehan Kursi Parpol DPRRI Hasil pemilu 2004 dibandingkan 1999, www.cetro.or.id diakses pada tanggal 18 Maret 2008
- Internet, Oportunisme, Krisis Identitas dan Ideologi, Sabtu, 07 Mei 2005. [http://164.203.71.11/kompas-cetak/0506/07/fokus/Wawancara dengan Clifford Gertz](http://164.203.71.11/kompas-cetak/0506/07/fokus/Wawancara%20dengan%20Clifford%20Gertz), diakses tanggal 11 September 2007
- Internet: Peran Parpol Dalam Islam, diakses tanggal 18 Maret 2008. <http://www.hizbut-tahrir.or.id/al-waie/index.php/2008/02/05/konstruksi-parpol-islam-ideologi>
- Republika, 15 Februari 2013